Pelindungan hukum terhadap konsumen atas penawaran tiket murah sebagai pelaku usaha berdasarkan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009
Heveline Adinda Veronica, Ninik Darmini
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Legal Protection for Consumers Regarding the Offering of Cheap Tickets Based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 10 of 2009 on Tourism

Heveline Adinda Veronica* Ninik Darmini **

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the forms of legal protection provided to consumers of tourism services regarding low-cost tickets based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as to identify and analyze the forms of legal liability borne by tourism service business actors in the event of losses suffered by consumers.

This study is escriptive study. The data used in this research consist of primary data and secondary data, namely data obtained through the study of books, laws and regulations, journal articles, and other scientific works prepared based on scientific principles related to this research. The data analysis uses a qualitative method and is presented with an inductive conclusion-drawing approach.

This research concludes the following; first, repressive legal protection is a form of protection provided after a violation of consumer rights has occurred. This protection includes mechanisms for imposing sanctions on business actors, providing compensation to harmed consumers, and dispute resolution through legal channels, both non-litigation and litigation, by filing claims with the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or through the general court as regulated in Articles 45–48. Second, if consumers suffer losses, business actors are obliged to provide compensation for damage, pollution, or loss resulting from the services traded.

Such compensation may take the form of a refund, replacement of the service with an equivalent one, or the provision of other compensation of equal value

Mahasiswi Magister Hukum* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Key words: *legal protection, consumer, low-cost ticket, tourism*

Pelindungan hukum terhadap konsumen atas penawaran tiket murah sebagai pelaku usaha berdasarkan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009
Heveline Adinda Veronica, Ninik Darmini
Universitas Gadjah Mada, 2025 | diunduh dari http://jdih.pom.go.id

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENAWARAN TIKET MURAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Heveline Adinda Veronica* Ninik Darmini **

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas jasa pariwisata terhadap tiket murah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan juga untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa pariwisata apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Cara memperoleh data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal dan karya karya ilmiah lainnya yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data menggunakan metode kualitatif, disajikan dengan metode penarikan Kesimpulan bersifat induktif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: *pertama*, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Perlindungan ini mencakup mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku usaha, pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, serta penyelesaian sengketa melalui jalur hukum baik secara non-litigasi maupun litigasi dengan cara mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45–48. Kedua apabila terjadi kerugian terhadap konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat jasa yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian jasa dengan yang sejenis, atau pemberian kompensasi lain yang setara nilainya.

Mahasiswi Magister Hukum*

Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, tiket murah, kepariwisataan